

## EVALUASI PROGRAM PEMERINTAH TENTANG HIV/AIDS DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2012

**RIZKI ANANDA**  
[Risky\\_ad@yahoo.com](mailto:Risky_ad@yahoo.com)  
**085265921128**

(Pembimbing : Drs. H. Muhammad Ridwan)  
Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Km 12.5 Panam

### ABSTRAK

*Based on the phenomenon in the implementation of government programs on HIV / AIDS is the responsibility of the Local Government Pekanbaru. For its implementation, local governments will delegate authority to the KPA Pekanbaru. While in charge is Deputy Mayor. Evaluation of programs implemented in Pekanbaru City Government with respect to the Program Counter is not running as it should. It is seen not sanggupnya government in response to the spread of HIV / AIDS in the city of Pekanbaru, even people with HIV / AIDS continues to increase every year. Thus, prevention programs can not be implemented that require evaluation in order to know the cause of this reduction programs can not reach the target.*

*The purpose of this study was to determine and analyze Evaluation of Government Programs on HIV / AIDS in the city of Pekanbaru in 2012. Data obtained from respondents will be grouped by type, and then processed and presented in tabular form and then analyzed qualitatively and eventually will get conclusions about the results of the research.*

*The results of the study concluded that the implementation of the program is the reduction of HIV / AIDS due to the limited amount of budgetary funds provided for the KPA limited so as not sufficient to carry out the work program primarily working in AIDS prevention programs in City Pekanbaru. Facilities and infrastructure lacking in the work program that caused the KPA is an independent institution which is not a government-owned institution. So the government needs to support the NAC effort in order to implement the program of work as are assigned. Solidaristas society lacking in addressing the problem of HIV / AIDS. Places that can cause infections such as AIDS where prostitution is still widely available in the city of Pekanbaru.*

**Keywords: Evaluation, Government Programs, HIV / AIDS**

## **A. Latar Belakang**

Di Propinsi Riau pada saat ini jumlah penderita HIV-AIDS selalu bertambah, apabila tidak tertangani secara serius akan mengakibatkan permasalahan yang sangat merugikan apabila tanpa adanya penanganan yang serius untuk mengatasi permasalahan ini. Namun pemerintah sudah mencoba untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi nya dengan membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang disingkat KPA Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi Penanggulangan AIDS sehingga lebih Intensif, menyeluruh, dan terpadu dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 dimana KPAN bertugas:

- a. menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
- b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
- d. melakukan penyebaran informasi mengenai AIDS kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
- e. melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS;
- f. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah AIDS;
- g. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian, penanggulan AIDS;
- h. Memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan AIDS;

Supaya adanya efektifitas dalam koordinasi upaya penanggulangan AIDS sehingga lebih intensif, menyeluruh, dan terpadu, dibentuk juga komisi penggulangan AIDS di daerah. Dimana tugas KPA kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 240 Tahun 2011 adalah :

- a. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkahlangkah yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan komisi penanggulangan AIDS Nasional.
- b. Memimpin, mengelola, mengendalikan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru
- c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan HIV dan AIDS
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penaggulangan AIDS Kota Pekanbaru
- e. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS
- f. Menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan pemerintah desa/kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS

- h. Mendorong terbentuknya LSM/Kelompok Peduli HIV dan AIDS
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada KPA Nasional
- j. Mengadakan pertemuan pengurus secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada walikota Pekanbaru secara berkala sekurang-kurangnya dua kali setahun

Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru dibentuk dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan AIDS, dimana dianggap perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelangsungan penanggulangan AIDS dan menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan, sosial, politik dan ekonomi serta dalam rangka meningkatkan efektifitas koordinasi penanggulangan AIDS sehingga lebih intensif, menyeluruh dan terpadu. Namun dalam keberadaan KPA masih belum memberikan hasil yang memuaskan sebab masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki KPA dalam melaksanakan program-program pencegahan HIV/AIDS. Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 240 Tahun 2011 tentang KPA, maka KPA Kota Pekanbaru bertanggung jawab Kepada Walikota Pekanbaru.

Secara garis besar, program KPA Kota Pekanbaru adalah Program Pencegahan HIV/AIDS, Program Pengobatan dan Perawatan serta Dukungan terhadap ODHA dan Program Penunjang. Program Pencegahan bertujuan agar masyarakat yang tidak terkena HIV/AIDS dapat terhindar dari HIV/AIDS. Program pengobatan dan perawatan bertujuan agar penderita HIV/AIDS dapat hidup layak dan memiliki semangat untuk sembuh atau tidak menularkan kembali kepada orang yang tidak terinfeksi. Sedangkan program penunjang adalah untuk sama-sama baik pemerintah maupun masyarakat untuk menanggulangi masalah HIV/AIDS sehingga perkembangannya dapat diantisipasi.

Dari program-program tersebut, perlu dievaluasi agar setiap program yang dilaksanakan dapat diketahui keberhasilannya dan kegagalan dari program tersebut. Dengan mengevaluasi, maka program-program tersebut dapat diketahui kelemahan dan keunggulan. Kelemahan akan diantisipasi agar dapat diperbaiki sedangkan keunggulan terus ditingkat. Namun kenyataan di lapangan, evaluasi program jarang dilakukan. Sehingga program-program yang ditetapkan tidak semuanya dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Untuk itu, diperlukan perhatian dari pemerintah agar dapat mengevaluasi kembali program-program KPA agar dapat mencapai sasaran yaitu menekan jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Pekanbaru.

Keberadaan KPA seharusnya dapat memberikan manfaat yang besar dalam penanggulangan penularan HIV/AIDS. Berdasarkan data dari laporan KPAK Pekanbaru, Kegiatan program pencegahan dan penanggulangan AIDS melibatkan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi swasta. Keterlibatan penderita dalam program ini hanya sampai pada level pelaksanaan kegiatan.

Berbagai program telah dilaksanakan KPA Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk penanggulangan penularan HIV/AIDS. Adapun program yang dilaksanakan KPA Kota Pekanbaru diantaranya Penyuluhan. Penyuluhan dilakukan kepada Mucikari, PSK, pengelola panti pijat dan anggota, pengelola bar dan anggota, pelajar dan mahasiswa. Tujuan dilaksanakan penyuluhan agar masyarakat mengetahui bahaya dari HIV/AIDS itu sehingga dapat mengantisipasi diri dari penularannya. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun.

Program kegiatan lainnya dengan mencetak spanduk, cetak foster HIV dan AIDS. Spanduk ini akan dipasang di Perkantoran, pasar, sekolahan, jalan-jalan. Tujuannya agar pembaca spanduk dapat mengetahui bahaya dari HIV/AIDS tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat disajikan perumusan masalah yaitu:

“Bagaimana Evaluasi Program Pemerintah Tentang HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru Tahun 2012?”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Evaluasi Program Pemerintah Tentang HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru Tahun 2012.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis factor penggambar dalam Program Pemerintah Tentang HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru Tahun 2012.

## **B. Studi Kepustakaan**

Menurut Suarsimi (2007: 297) evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. Dalam kamus (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan.

Menurut Arikunto (2011: 114) dalam Tyler (1950) yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasi. Selanjutnya menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan.

Menurut Mulyatiningsih (2011: 114), evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain.
- b. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, maka evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif. Oleh karena itu, dalam evaluasi program, pelaksana berfikir dan menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar (2011: 7), terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian dan evaluasi program adalah sebagai berikut:

- a. Dalam kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang sesuatu kemudian hasilnya dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan criteria atau standar tertentu.
- b. Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh rumusan masalah karena ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program, dan apabila tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksanaan ingin mengetahui letak kekurangan itu dan apa sebabnya.

Dengan adanya uraian diatas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan penelitian evaluatif. Pada dasarnya penelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Model-model evaluasi yang satu dengan yang lainnya memang tampak bervariasi, akan tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi. Selanjutnya informasi yang terkumpul dapat diberikan kepada pengambil keputusan agar dapat dengan tepat menentukan tindak lanjut tentang program yang sudah dievaluasi.

Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar (2011: 40), membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu:

- a. Goal Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler.
- b. Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh Scriven.
- c. Formatif Summatif Evaluation Model, dikembangkan oleh Michael Scriven.
- d. Countenance Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake.
- e. Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake.
- f. CSE-UCLA Evaluation Model, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan.
- g. CIPP Evaluation Model, dikembangkan oleh Stufflebeam.
- h. Discrepancy Model, dikembangkan oleh Provus.

Pemilihan model evaluasi yang akan digunakan tergantung pada tujuan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi program pembelajaran keterampilan memasak digunakan pendekatan system. Pendekatan system adalah pendekatan yang dilaksanakan dalam mencakup seluruh proses pendidikan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan ini, evaluasi program yang diterapkan adalah evaluasi program dengan CIPP Evaluation Model. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Stufflebeam yang dikenal dengan CIPP Evaluation Model. CIPP merupakan singkatan dari *Context, Input, Process and Product*.

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya. Menurut Dun, evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya:

1. Fokus Nilai. Evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Kerena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara actual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).
4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relative dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Evaluasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan suatu program. Manfaat positif akan diperoleh apabila evaluasi dijalankan dengan benar dan memperhatikan segenap aspek yang ada dalam suatu program. Menurut Dunn, mempunyai sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, yakni:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnya, kelompok kepentingan dan pegawai negeri, kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, substantif).
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat member sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang.

Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain. Selain hal tersebut diatas, mengikuti Samodra Wibawa (1994: 10-11), evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

- a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antarberbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan actor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk member arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

Menurut Dunn dalam Rasyid (2008: 37) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

1. Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakn dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas *substantive*, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Secara singkat kriteria evaluasi menurut Thoha (2006: 16), meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Dari kriteria evaluasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa evaluasi yang harus dilakukan bersifat efektif dan efisien. Selain itu, evaluasi harus memiliki kecukupan data serta pemerataan. Kemudian evaluasi harus diberikan tanggapan secara objektif tanpa ada hal yang ditutup-tutupi. Terakhir evaluasi harus mencapai sasaran yang diharapkan.

Menurut Soewarno (2006: 37) evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut *timing* evaluasi, yaitu *sebelum dilaksanakan*, *pada waktu dilaksanakan*, dan *setelah dilaksanakan*. Secara spesifik, Handayani mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yang tujuan, asumsi, dan bentuk-bentuk utamanya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Evaluasi Semu. Tujuannya menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan. Asumsi bahwa

ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak controversial. Bentuk utama adalah eksperimentasi sosial akutansi sistem sosial Pemeriksaan sosial Sintesis riset dan praktik.

2. Pendekatan Evaluasi Formal, Tujuannya adalah menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan Asumsinya tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai. Bentuk utama adalah evaluasi Perkembangan, evaluasi Eksperimental, evaluasi proses retrospektif, evaluasi hasil retrospektif
3. Pendekatan evaluasi keputusan teoritis. Tujuannya adalah menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan. Asumsinya tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai. Bentuk utama penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi Analisa utilities multiatribut

### **C. Konsep Operasional**

Dalam penelitian ini penulis menurunkan konsep oprasional yang digunakan untuk menjelaskan batasan-batasan permasalahan sebagai berikut:

- Evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program.
- Program adalah rencana suatu pelaksanaan yang akan dilakukan sebagai dasar dalam operasional suatu lembaga atau organisasi.
- Pemerintah adalah instansi atau dinas yang menangani masalah pemerintahan di daerah.
- Kegiatan adalah suatu pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam operasional lembaga atau organisasi.
- Penanggulangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dari dampak negatif dari suatu masalah.
- Penularan adalah hal-hal yang dapat terjangkau suatu wabah baik disengaja maupun tidak disengaja.
- HIV/AIDS adalah sejenis penyakit menular yang menyerang kekebalan tubuh manusia.
- Komisi Penanggulangan AIDS adalah lembaga yang dibentuk pemerintah melalui keputusan presiden dan berbagai keputusan lainnya untuk melakukan kebijakan dalam penanggulangan AIDS mulai di Perkotaan hingga kedaerah-daerah.
- Kota Pekanbaru adalah salah satu kota yang terdapat di Propinsi Riau.
- Program Pencegahan HIV/AIDS merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS.
- Program Pengobatan dan Perawatan serta Dukungan terhadap ODHA yaitu suatu kegiatan untuk memberikan pelayanan berupa pengobatan dan perawatan bagi ODHA agar tetap dapat bertahan hidup normal.
- Program Penunjang yaitu program yang dibentuk untuk memberikan kegiatan bagi ODHA dalam menghadapi kondisinya.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian ditetapkan karena Kota yang terbesar di Provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota provinsi. Selain itu, penderita HIV/AIDS yang terbanyak di Propinsi Riau berdomisi di Kota Pekanbaru.

### **2. Key Informan**

Sehubungan dengan penelitian Program Kegiatan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru Pada Komisi Penanggulangan AIDS, maka dalam penelitian ini menggunakan key informan meliputi:

- Wakil Walikota Pekanbaru selaku Ketua KPA Kota Pekanbaru yaitu Bapak Ayat Cahyadi, S.Si. Apabila beliau berhalangan akan diwakilkan oleh asisten Wakil Walikota Pekanbaru oleh Bapak Drs. H. Mohd. Noer, MBS, SH, M.Si, MH. dengan jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)
- Kepala Dinas Kesehatan yaitu ibu dr. Rini Hermiyati selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Apabila beliau berhalangan akan diwakilkan oleh dr. H. Dahril Darwis MKM selaku Asisten Kepala Dinas.
- Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Umum yaitu ibu Hj.Husnimar Abdullah. Apabila beliau berhalangan, akan diwakilkan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemkot Pekanbaru Eli Fasya.

### **3. Jenis dan sumber data.**

#### **a. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh langsung dari informen melalui wawancara. Data primer terdiri dari

- (1) Evaluasi Program Pemerintah tentang HIV/AIDS di Kota Pekanbaru Tahun 2012 terdiri dari :
  - Program Penanggulangan
  - Program Pengobatan
  - Program Lanjutan
- (2) Faktor penghambat Evaluasi Program Pemerintah tentang HIV/AIDS di Kota Pekanbaru Tahun 2012.

#### **b. Data Sekunder**

Adalah data yang sudah diolah dan diperoleh dari KPA Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan dan Dinas Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru atau yang lainnya yang sifatnya dapat menunjang tercapainya suatu penelitian ini dengan sempurna. Data yang dimaksud seperti :

- Gambaran Umum Kota Pekanbaru.
- Profil KPA Kota Pekanbaru
- Keadaan Pengurus KPA Kota Pekanbaru.
- Tugas dan fungsi KPA Kota Pekanbaru
- Sarana dan Prasarana KPA Kota Pekanbaru.
- Struktur organisasi KPA Kota Pekanbaru.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik seperti :

- a. Observasi yaitu melakukan peninjauan secara langsung ke daerah penelitian untuk melihat kejadian sebenarnya secara gambaran umum.
- b. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung kepada informen yang sudah dipersiapkan dan ditentukan sebelumnya.

#### 5. Analisa data

Data yang diperoleh dari responden akan dikelompokan menurut jenisnya, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga pada akhirnya akan mendapat kesimpulan tentang hasil penelitian. Setidaknya, terdapat lima jenis metode penelitian kualitatif yang banyak dipergunakan, yaitu: (1) observasi terlibat; (2) analisa percakapan; (3) analisa wacana; (4) analisa isi; dan (5) pengambilan data ethnografis. (Kountur, 2004: 47) Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan ini, penulis menggunakan kualitatif observasi. Observasi terlibat biasanya melibatkan seorang peneliti kualitatif langsung dalam *setting* sosial. Ia mengamati, secara lebih kurang “terbuka”, di dalam Program Kegiatan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru.

#### E. Hasil Penelitian

Penularan HIV/AIDS yang belum dapat ditanggulangi di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru, menyebabkan program pemerintah tangan HIV/AIDS perlu dilakukan evaluasi agar program tersebut dapat mencapai sasaran dalam pelaksanaannya. Dengan melaksanakan program – program yang dikembangkan dari setiap area prioritas secara bersungguh – sungguh, penuh tanggung jawab, terpadu, harmonis dan berkesinambungan maka walaupun dengan sumberdaya yang terbatas, tujuan penanggulangan HIV dan AIDS akan dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh karena akan terdapat kemampuan untuk:

- Mencegah meluasnya penularan HIV dan menjamin akses terhadap berbagai upaya pencegahan, perawatan dan pengobatan.
- Berkontribusi untuk menyediakan kebutuhan ODHA untuk meringankan penderitaan sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka.
- Menjamin *capacity building* bagi mereka yang terlibat dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
- Mengkoordinasikan dan mempertahankan respon

Mengingat luasnya wilayah Kota Pekanbaru, sementara sumberdaya masih terbatas, kriteria dalam menentukan tempat dan wilayah pelaksanaan program perlu memperhatikan data epidemiologis HIV dan AIDS dan kemungkinan memperoleh daya ungkit yang besar bila program dilaksanakan.

Area prioritas penanggulangan HIV dan AIDS untuk tahun 2007-2010 adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan HIV dan AIDS;
2. Perawatan, Pengobatan dan Dukungan kepada ODHA;
3. Surveilans HIV dan AIDS serta Infeksi menular Seksual;
4. Penelitian dan riset operasional;
5. Lingkungan Kondusif;
6. Koordinasi dan harmonisasi multipihak;
7. Kesiambungan penanggulangan

Masalah AIDS bukanlah masalah kesehatan semata akan tetapi telah menjadi masalah sosial yang sangat kompleks. Upaya pencegahan dan penanggulangan memerlukan berbagai pendekatan dan diselenggarakan oleh berbagai pihak. Peran utama dijalankan oleh masyarakat dengan arahan dan pembinaan oleh sektor-sektor pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pemimpin upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS baik di pusat maupun di daerah. Banyaknya pemangku kepentingan yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ini mengharuskan adanya koordinasi yang baik sejak perencanaan sampai evaluasinya.

Wawancara dengan informan tentang realisasi pelaksanaan koordinasi kebijakan dalam penanggulangan HIV/AIDS, informan mengatakan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dengan liding sektor Dinas Kesehatan telah menyusun Renstra Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2008-2012, berikut petikan wawancara :

” ... Rencana strategis sudah kita buat untuk 2008-2012 ... ”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua I KPA Kota Pekanbaru, berikut kutipan wawancara :

” ... Sebagai tindak lanjut dari kebijakan pusat, KPA menyusun Renstra Kota Pekanbaru yang disusun untuk lima tahunan ...”

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru telah mengimplementasikan tugas pokok koordinasi kebijakan upaya penanggulangan AIDS melalui koordinasi kebijakan dan penyusunan renstra kabupaten. Pelaksanaan koordinasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kota Pekanbaru telah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Bab II pasal 6 yang menyebutkan bahwa KPA Kabupaten bertugas menyusun kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Untuk pertanyaan kepada siapa renstra disosialisasikan, semua informan menyatakan bahwa kebijakan dan renstra pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS Kota Pekanbaru tahun 2008-2012 disampaikan melalui Seminar Hari AIDS Sedunia tahun 2008 dan rapat koordinasi kepada semua lintas sektor anggota KPA, Lembaga swadaya masyarakat, ikatan profesi kesehatan, dan ormas dengan undangan Bapak Wakil Walikota Kota Pekanbaru dalam rangka untuk

mendapatkan dukungan operasional terhadap pelaksanaan kebijakan dan renstra yang telah disusun, berikut kutipan wawancara :

”... KPA dengan liding sektor dinas kesehatan yang pada tahun 2008 mengadakan seminar AIDS dan sekalian menyampaikan strategi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS Kota Pekanbaru dengan melibatkan lintas sektor dan lembaga sosial untuk mendapat dukungan dalam operasionalnya di masa mendatang ... ”.

Wawancara dengan Wakil Ketua I KPA Kota Pekanbaru tentang sosialisasi renstra pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS disampaikan pada waktu seminar dan rapat koordinasi dengan mengundang semua anggota KPA, berikut kutipan wawancara :

” .... Semua anggota KPA, beberapa LSM dan ikatan profesi kesehatan kita undang untuk hadir dengan harapan ada dukungan dalam kebersamaan penanggulangan HIV/AIDS. Pada seminar tersebut hadir Ketua KPA Kabupaten dan Propinsi ...”

Hasil penelitian ini didapatkan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kota Pekanbaru telah melakukan sosialisasi kebijakan dan renstra dengan melibatkan semua anggota yang tergabung dalam KPA Kota Pekanbaru. Upaya ini merupakan realisasi dalam memenuhi ketetapan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Pusat, bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS memerlukan berbagai pendekatan dan diselenggarakan oleh berbagai pihak dimana peran utama dijalankan oleh masyarakat dengan arahan dan pembinaan oleh sektor-sektor pemerintah yang berperan sebagai pemimpin upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS baik di pusat maupun di daerah. Banyaknya pemangku kepentingan yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS mengharuskan adanya koordinasi yang baik sejak perencanaan sampai evaluasinya.

Hambatan yang ditemukan dalam Program Kegiatan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Pada Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah dana anggaran yang disediakan untuk KPA terbatas sehingga tidak mencukupi untuk melaksanakan program kerja terutama program kerja dalam penanggulangan AIDS di Kota Pekanbaru.
2. Sarana dan prasarana yang kurang dalam pelaksanaan program kerja yang disebabkan KPA merupakan lembaga independen yang bukan merupakan lembaga milik pemerintah. Sehingga usaha pemerintah perlu mendukung KPA agar dapat melaksanakan program kerja sebagai mana yang ditetapkan.
3. Solidaritas masyarakat yang kurang dalam menyikapi masalah HIV/AIDS. Tempat-tempat yang dapat menyebabkan timbulnya penularan AIDS seperti tempat prostitusi masih banyak terdapat di Kota Pekanbaru.

## **F. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

1. Tidak terlaksananya program dalam pengentasan HIB/AIDS disebabkan terbatasnya jumlah dana anggaran yang disediakan untuk KPA terbatas sehingga tidak mencukupi untuk melaksanakan program kerja terutama program kerja dalam penanggulangan AIDS di Kota Pekanbaru.
2. Sarana dan prasarana yang kurang dalam pelaksanaan program kerja yang disebabkan KPA merupakan lembaga independen yang bukan merupakan lembaga milik pemerintah. Sehingga usaha pemerintah perlu mendukung KPA agar dapat melaksanakan program kerja sebagai mana yang ditetapkan.
3. Solidaritas masyarakat yang kurang dalam menyikapi masalah HIV/AIDS. Tempat-tempat yang dapat menyebabkan timbulnya penularan AIDS seperti tempat prostitusi masih banyak terdapat di Kota Pekanbaru.

### **2. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah daerah menyediakan alokasi dana untuk program kegiatan KPA dengan tujuan agar penyebaran HIV/AIDS di Kota Pekanbaru dapat teratasi. Dengan adanya bantuan dana, maka KPA dapat melaksanakan program kegiatan sehubungan dengan pencegahan penyebaran HIV/AIDS sehingga jumlah penderita HIV/AIDS dapat teratasi.
2. Sarana dan prasarana yang kurang dalam pelaksanaan program kerja sebaiknya lebih diupayakan kelengkapannya dan penanganannya harus bersifat universal. Sebab Penderita HIV/AIDS sudah ada di mana-mana. Dengan demikian, harus ada kesamaan dalam memberikan penanganan.
3. Sebaiknya KPA juga melakukan pendekatan dengan masyarakat agar dapat memberikan dukungan kepada penderita HIV/AIDS. Sebab penderita HIV/AIDS bukan musuh bagi masyarakat, melainkan hal yang harus diketahui agar dapat terhindar dari penyebaran virusnya. Dengan mengetahui penyakitnya, maka dapat dilakukan antisipasi penyebarannya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Curah, Jakarta.
- Bohari, 2003, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bryant, Coraline dan White C. Louise, 1982, *Manajemen Pembangunan untuk Negara-negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Dror, Yehezkel, 1968, *Public Policy – Making Reexamined*, San Fransisco, Chandler Publishing Company.
- Dye, Thomas R., 1981, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs Prentice Hall Inc.
- Grindle, Merike S., 1980, *Policy Content and Context in Implementation Princeton*, University Press New Jersey.
- Judisuseno, R. Santoso Broto Dihadjo, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung.
- Lister, James P., 1980, *Public Implementation : Evaluation of the Field and Agenda of Future Research Policy Studies*, Review Autum.
- Handayani, Soewarno, 2006, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, PT. Gunung Agung Jakarta.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Revisi, Andi Offset, Yogyakarta.
- Munawir, 2006, *Dasar-dasar Penagihan Pajak Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nugroho D, Riant., 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Nugroho D, Riant, 2006, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soemahamidjaya, 2006, *Hukum Pajak dan Keadilan*, NV. Eresco, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2003, *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis & Transformasi Pikiran Nagel*, Balairung & Co., Yogyakarta.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2002, *Perpajakan Indonesia Buku I*, PT. Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- SK Menpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Mengenai Pelayanan Publik.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004 Tetaang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 240 Tahun 2011 Tetang Tugas KPA Kota Pekanbaru.